

Menggagas Pembangunan Desa Terintegrasi

KEMISKINAN di Indonesia sebagian besar adalah kemiskinan pedesaan. BPS

melaporkan pada tahun 2009 terdapat 32,5 juta orang miskin di Indonesia, dimana 20,6 juta atau 63,3% dari jumlah tersebut adalah masyarakat desa. Data dari Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat bahwa sampai saat ini masih terdapat 32.379 desa tertinggal atau 45,86% dari jumlah seluruh desa di Indonesia.

Pemerintah bukannya tidak serius dalam menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Banyak sekali program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah, mulai dari program Bandes dan IDT pada jaman Orde Baru sampai PNPm pada saat sekarang ini.

Pertanyaannya, kenapa program-program tersebut sepertinya masih belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat desa?

Pada dasarnya ada dua pendekatan utama yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pertama adalah pendekatan sektoral. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh unsur pelaksana dari kementerian sektoral dan lembaga non departemen. Kita dapat melihat hampir semua instansi Pemerintah Pusat memiliki program masing-masing di tingkat desa. Instansi tertentu dan kepolisian pun tidak mau ketinggalan dengan menempatkan Babinsa dan Polmas di tengah masya-

Oleh: Sutiyo*

rakat desa.

Walaupun sangat banyak jumlahnya, pendekatan pembangunan sektoral memandang permasalahan kemiskinan di desa dari sudut pandang yang sepotong-sepotong sesuai bidang mereka. Kesan kurang koordinasi dan tumpang tindih antar program pun tidak dapat dielakkan.

Kedua adalah pendekatan pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 menyatakan pembinaan dan pengaturan desa menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keterbatasan sumber daya Pemerintah Daerah dan luasnya wilayah kerja sering membuat Pemerintah Kabupaten/Kota kewalahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Cerita sukses otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kadang muncul dari beberapa wilayah, tetapi cerita tentang kegagalan otonomi daerah juga tidak kalah banyaknya.

Kemiskinan di desa merupakan persoalan yang kompleks. Ia meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang saling berkaitan satu sama lain. Mengetahui akar kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat semua aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa terintegrasi melalui penguatan otonomi desa karena dapat dijadikan solusi mengatasi masalah yang muncul dari pendekatan sektoral

dan pendekatan pemerintah daerah.

Konsep ini akan memadukan dua trend utama dalam study pemerintahan dan study pembangunan, yaitu desentralisasi dan pemberdayaan, secara bersama-sama ke medan desa.

Pembangunan desa terintegrasi melalui penguatan otonomi desa memiliki beberapa keuntungan. Dibandingkan dengan pembangunan sektoral, pendekatan ini akan menyelesaikan masalah secara terintegrasi dengan memperhatikan semua aspek kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan, khususnya dari segi pendanaan dan personel.

Dibandingkan dengan pendekatan pemerintah daerah dimana isu pemerintahan dan pembangunan sering berhenti di tingkat Kabupaten/Kota, pendekatan ini akan membawa demokratisasi ke tingkat desa. Pemerintah desa dapat merencanakan pembangunan setempat sesuai dengan aspirasi warga.

Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah peningkatan dana dalam bentuk block grant untuk pemerintah desa. Instansi-instansi teknis dan pemerintahan daerah harus merelakan anggaran mereka dipotong untuk kemudahan dialih-alokasikan guna menambah besaran Alokasi Dana Desa. Di samping itu, perlu disusun pola hubungan kerja yang jelas antara

pemerintah desa dengan pemerintah supra desa. Peranan institusi sektoral adalah sebagai fasilitator terutama dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan aspek teknis manajerial/sebut kegiatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan dalam mensinergikan kegiatan pembangunan antara desa yang satu dengan yang lainnya dalam kebijakan umum pembangunan daerah. Pada akhirnya, pengambilan keputusan pembangunan tetap berada di tangan pemerintah desa.

Hal yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparaturnya pemerintah desa. Kebijakan pembangunan selama ini yang memampatkan pemerintah desa sebagai obyek pembangunan telah membuat mereka sangat tergantung kepada pemerintah.

Kita tidak perlu berkecil hati dengan masalah sumber daya aparaturnya pemerintah desa. Berhasil atau tidaknya program-program pemerintah di tingkat desa selama ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis manajerial, tetapi lebih ditentukan oleh seni kepemimpinan wilayah dan komunikasi personal yang baik. Penguasaan aparat pemerintah desa terhadap dua hal terakhir sudah tidak perlu diragukan lagi.

* Sutiyo, SSTP, M.Si adalah perangkai kelurahan Kelung-menjungan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah